

Judul : BSU Pekerja segera cair, komisi IX sarankan bansos tepat sasaran
Tanggal : Jumat, 02 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

BSU Pekerja Segera Cair Komisi IX Sarankan Bansos Tepat Sasaran

FOTO: DPR GO.ID



Asep Romy Romaya

ANGGOTA Komisi IX DPR Asep Romy Romaya menyambut baik rencana Pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Namun, Pemerintah diminta memastikan program bantuan sosial ketenagakerjaan tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi daya beli keluarga pekerja.

"Dalam kondisi daya beli yang perlu dijaga, bantuan ini menjadi bantalan penting bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan harian," ujar Asep di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Sebelumnya, Pemerintah akan kembali menyalurkan BSU pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut akan diberikan kepada 13,3 juta pekerja dengan besaran Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan atau senilai total Rp 900 ribu.

Asep melanjutkan, Pemerintah mesti transparan sejak awal mengenai kriteria penerima, sumber data, dan mekanisme verifikasi. Juga aturan teknis dan rute pengaduan perlu diperjelas agar tak memicu kebingungan warga. Karena itu, kementerian terkait diminta tidak menunda sosialisasi kriteria resmi penerima BSU

2026 ke publik.

Penetapan kriteria baku, kata dia, mendesak diterbitkan untuk mencegah kerancuan informasi yang mengacu pada syarat penyaluran tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah perlu memberikan kepastian kriteria resmi BSU 2026 dan jangan membiarkan publik menggunakan asumsi tahun lalu. "Kepastian informasi penting agar tak terjadi simpang siur di lapangan," tegas politisi PKB.

Ia menekankan, validasi data kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan serta verifikasi batas upah maksimal wajib diawasi secara mendalam. Sistem pencocokan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan keanggotaan dituntut akurat demi mengeliminasi celah kelalaian maupun salah sasaran.

Karena yang diinginkan masyarakat sederhana, bantuan benar-benar diterima pekerja yang berhak tanpa ada kebocoran. "Jangan sampai ada buruh yang memenuhi syarat justru terlewat dari pendataan," tandasnya.

Untuk itu, Asep meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyediakan saluran posko pengaduan (hotline) terpadu yang responsif dan mudah dijangkau dari daerah. Akses pelaporan yang cepat dipandang penting untuk memproses keluhan pekerja yang mengalami kendala administrasi perbankan.

"Pengawasan penyaluran BSU perlu diperketat seiring besarnya anggaran yang dikeluarkan negara. Kanal pengaduan publik perlu disiapkan agar setiap masalah teknis penerima bisa diselesaikan cepat," imbuah legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini. ■ TIF